



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jl. Raya Koto Baru Telp. (0755) 20830 Fax. (0755)20830

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Nomor. 524/ 09/DPPKB&P3A/2017

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA ,PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN SOLOK

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan kepada masyarakat dan aparatur dinas dalam pelayanan dibidang Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana ,Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, maka perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP);
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana ,Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan segala bentuk Diskriminasi dan Kekerasan terhadap Perempuan(Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
 3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak;
 4. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan Korban;
 6. Undang- undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia nomor 5063);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Biokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Tahun 2016 – 2021;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyusunan SOP dan Fungsi SKPD.
15. Peraturan Bupati Solok Nomor 48 Tahun 2016 tentang Fungsi dan Uraian Tugas Dinas PPKB dan P3A.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Pertama : . Memberlakukan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok dalam Lingkup Pelaksanaan kegiatan pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ;
- Kedua : Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok disusun dalam rangka peningkatan pelayanan dan kemudahan dalam prosedur pelayanan dibidang pengendalian penduduk,

pelayanan keluarga berencana pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai dengan lampiran Surat Keputusan ini;

Ketiga : Surat Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Koto Baru

Pada Tanggal : 04 Januari 2017

**Kepala Dinas PPKB dan P3A
Kabupaten Solok**

**ZULFAHMI,SH.MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19660325 199402 1 001**

**LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN
PENDUDUK KELUARGA BERENCANAAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN SOLOK**

NOMOR : 524/ 90 /DPPKB & P3A/2017

**PERIHAL : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) DINAS
PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN SOLOK KABUPATEN SOLOK TAHUN 2017**

1. SOP Pencairan Gaji Pegawai
2. SOP Pencairan Dana
3. SOP Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan Semester dan Tahunan
4. SOP Penyusunan Laporan Keuangan
5. SOP Pencatatan Transaksi Pada BKU
6. SOP Penyusunan Lakip SKPD
7. SOP Monitoring Laporan Triwulan
8. SOP Prosedur Penyusunan Laporan Fisik dan Keuangan
9. SOP Penyusunan Laporan Tahunan
10. SOP Penyusunan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ, LPPD)
11. SOP Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RENJA)
12. SOP Penyusunan Rencanan Strategis DPPKB dan P3A
13. SOP Administrasi Surat Masuk
14. SOP Administrasi Surat Keluar
15. SOP Kenaikan Gaji Berkala
16. SOP Kebersihan Kantor
17. SOP Kenaikan Pangkat
18. SOP Penetapan Masa Pensiun Pegawai (MPP)
19. SOP Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)
20. SOP Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)
21. SOP Pelayanan Akseptor KB (MOP,MOW)
22. SOP Pelayanan Akseptor KB (Implant)
23. SOP Pelayanan Akseptor KB (IUD)
24. SOP Pelayanan KB pada Muyan
25. SOP Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli KB
26. SOP Pembentukan dan Pembinaan Kampung KB
27. SOP Penyuluhan Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak.
28. SOP Pemilihan Duta GenRe Tingkat Kabupaten Solok
29. SOP Penyuluhan Penanggulangan Narkoba,PMS Termasuk HIV/AIDS
30. SOP Pelaksanaan kegiatan Saka Kencana TK Propinsi Sumatera Barat.
31. SOP Pengumpulan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Reproduksi remaja
32. SOP Pendataan Keluarga
33. SOP Memperkuat dukungan dan Partisipasi Masyarakat
34. SOP Jambore Institusi Masyarakat Pedesaan
35. SOP Penyusunan dan Pengolahan Data Analisa Perspektif Gender
36. SOP Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
37. SOP Pelaksanaan Sosialisasi yang terkait Kesetaraan Gender,Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
38. SOP Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak di Daerah
39. SOP Penguatan Kelembagaan PUG dan Anak.

40. SOP Penyuluhan Bagi ibu Rumah Tangga dalam membangun Keluarga Sejahtera
41. SOP Perumusan Kebijakan Peningkatan Peran dan Posisi Perempuan pada bidang Politik.
42. SOP Pembinaan Organisasi Perempuan.

**Kepala Dinas PPKB dan P3A
Kabupaten SoloK**

**ZULFAHMI,SH.MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19660325 199402 1 001**